



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp. 123.712.928.997,-

b. Pengeluaran

Rp. 7.740.197.582,-

Pembiayaan Netto

Rp. 115.972.731.415,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Rp. 00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Pebruari 2008



BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Pebruari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA BAWASDA,



SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008 NOMOR 8

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 RINGKASAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2008

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	789,063,039,948.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71,276,163,008.00
4.1.1.	PAJAK DAERAH	29,063,875,000.00
4.1.1.01.	Pajak Hotel	2,321,250,000.00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	937,875,000.00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	3,630,000,000.00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	321,750,000.00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	9,500,000,000.00
4.1.1.06.	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C	3,200,000,000.00
4.1.1.07.	Pajak Parkir	135,000,000.00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	33,900,742,515.00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	27,527,452,215.00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5,466,058,300.00
4.1.2.03.	Retribusi Perijinan Tertentu	907,232,000.00
4.1.3.	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6,634,615,493.00
4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	6,634,615,493.00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	10,614,930,000.00
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	4,000,000,000.00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	3,500,000,000.00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	32,617,000.00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1,915,613,000.00
4.2.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	672,395,234,690.00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35,739,448,690.00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	34,633,968,690.00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	905,480,000.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	588,001,786,000.00
4.2.2.01		588,001,786,000.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	48,654,000,000.00
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	48,654,000,000.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45,393,662,250.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27,701,069,000.00
4.3.3.01.	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi	27,701,069,000.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	17,692,593,250.00
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	17,692,593,250.00
	Jumlah Pendapatan	789,063,039,948.00
5.	BELANJA DAERAH	905,037,791,363.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	611,683,032,608.00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	496,348,456,608.00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	440,594,894,608.00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	50,377,888,000.00
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2,869,600,000.00
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2,304,104,000.00
5.1.2.	BELANJA BUNGA	145,688,000.00
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi	145,688,000.00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	24,053,770,000.00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	24,053,770,000.00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	19,489,520,000.00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	18,549,020,000.00
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Partai Politik	940,500,000.00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	68,145,598,000.00
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	68,145,598,000.00

1	2	3
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000.00
5.1.8.01.		3,500,000,000.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	293,354,758,733.00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21,875,112,200.00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	13,597,993,100.00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4,988,730,000.00
5.2.1.03.	Uang Lembur	1,810,209,100.00
5.2.1.04.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	278,525,000.00
5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1,199,855,000.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149,488,547,005.00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis	4,864,811,280.00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24,908,600,450.00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41,935,279,880.00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1,035,670,000.00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,298,839,150.00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,906,106,785.00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	434,902,000.00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	240,308,000.00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	248,207,000.00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,664,296,000.00
5.2.2.12.	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	158,810,000.00
5.2.2.13.	Belanja Pakelan Kerja	94,031,000.00
5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	114,925,000.00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,516,678,430.00
5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	2,880,000.00
5.2.2.17.	Belanja Pemulangan Pegawai	2,180,000.00
5.2.2.18.	Belanja Pajak / Retribusi	131,111,000.00
5.2.2.20.	Belanja Asosiasi	60,000,000.00
5.2.2.21.	Belanja Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan	103,617,000.00
5.2.2.22.	Belanja Penyelenggaraan / Pembinaan Pendidikan, Kesenian, Pemuda & olahraga dan Kebudayaan	25,904,069,730.00
5.2.2.23.	Belanja Pemeliharaan	12,067,628,300.00
5.2.3.	BELANJA MODAL	121,991,099,550.00
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,330,000,000.00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1,220,000,000.00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6,327,425,000.00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	21,800,000.00
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	41,983,000.00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2,555,147,000.00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	285,110,450.00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	409,651,000.00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,410,283,500.00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	254,572,000.00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	45,296,000.00
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9,357,000.00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	158,780,000.00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	45,310,000.00
5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Wewless	16,850,000.00
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	34,450,000.00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	784,776,000.00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,010,918,000.00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	24,861,598,000.00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9,822,468,800.00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17,237,452,000.00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6,000,000.00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	98,420,000.00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian*) Bangunan	52,168,506,800.00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	150,233,000.00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	69,000,000.00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	569,300,000.00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persejahteraan/Keamanan	22,850,000.00
	Jumlah Belanja	905,037,791,363.00
	Surplus/(Defisit)	(115,972,731,415.00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	115,972,731,415.00

1	2	3
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	123,712,928,997.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	101,900,409,858.00
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	91,827,004,898.00
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	10,073,404,760.00
6.1.2.	Pencaliran Dana Cadangan	13,000,000,000.00
6.1.2.01.	Pencaliran Dana Cadangan.	13,000,000,000.00
6.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4,340,262,582.00
6.1.3.01.		4,340,262,582.00
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	4,472,256,759.00
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	382,070,759.00
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	3,000,000,000.00
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	1,110,186,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	123,712,928,997.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,740,197,582.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	955,262,582.00
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	955,262,582.00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	3,258,725,000.00
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	3,000,000,000.00
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	151,135,000.00
6.2.3.11.	Pembayaran Utang Jangka Pendek	117,590,000.00
6.2.3.11.02.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	117,590,000.00
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	3,508,210,000.00
6.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Lembaga / masyarakat	3,508,210,000.00
6.2.4.03.01.	Pemberian Pinjaman daerah Kepada Koperasi / UKM / Pra Koperasi / Kel. Masyarakat / Masy.	3,508,210,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,740,197,582.00
	Pembiayaan neto	115,972,731,415.00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	8.00

Kota Magelang, 20 Februari 2008  
BUPATI MAGELANG

*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO